



JUM'AT, 05 OKTOBER 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Banyak Temuan KN, Inspektorat Galau

Implementasikan Probit Audit

BENGKULU - Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu Massa Siahaan mengaku galau terkait banyaknya masalah-masalah yang terjadi di Pemprov Bengkulu. Mulai dari banyaknya keluhan masyarakat tentang infrastruktur, banyak pejabat ditangkap APH dan KPK serta banyak temuan kerugian negara (KN). Oleh karena itu, Inspektorat punya terobosan baru yakni dengan mengubah

Provinsi Bengkulu melalui implementasi Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Risiko bersama Gapernas, Gapensi, Gapeksi dan media kemarin (4/10). Probit Audit yang dimaksud adalah metode penilaian secara independen untuk memastikan pengadaan barang jasa (PBJ) telah dilaksanakan dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran dan kejujuran serta mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

cara audit.

Massa mengatakan bahwa audit yang selama ini dilakukan ternyata belum efektif sehingga perlu perubahan pendekatan, mekanisme dan fokus audit, dari post audit yang sebelumnya bersifat represif dan kuratif menjadi preventif mulai sejak perencanaan, pengadaan sampai ditandatanganinya kontrak.

Ini dijelaskan Massa dalam rapat Focus Group Discussion (FGD) strategi peningkatan kualitas pembangunan penggunaan dana sektor publik.

"Kegalauan saya sejak masuk di Provinsi Bengkulu ini seperti pengaduan-pengaduan masyarakat tentang infrastruktur, banyaknya pejabat yang ditangkap APH dan KPK karena tersandung kasus hukum serta banyaknya temuan kerugian negara. Ini semua penyebab kualitas pembangunan rendah. Maka oleh karena itu perlu diimplementasikan Probit Audit," ujar Massa.

diiperpanjang hingga tanggal 20 Oktober. "Ada perimbangan dari pusat karena perkembangan terkini liberbagai daerah. Perpanangan dilakukan secara otomatis oleh panselnas," kata Salman ditemui di BKPSDM, kemarin.

Pelamar CPNS di Kabupaten BS, sambungnya, setiap hari terus bertamabah. Hingga siang kemarin terdapat ada 1.237 pelamar

Salman menambahkan, untuk jadwal pelaksanaan SKD belum bisa dipastikan karena pihaknya masih harus berkoordinasi dengan BKN. Namun tertera dalam surat BKN rentang waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), 26 Oktober-17 November. Sedangkan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), 22 November-28 November. "Untuk jad-

kan Pemerinta (Pemdes) untuk

sir pajak kendaraan tertunggak sejak tahun 1991. Tunggakan pajak kendaraan di BS mencapai Rp 13,6 miliar sejak tahun 1991. Terbanyak tunggakan kendaraan di Kecamatan Pino Raya.

Kasubag TU UPPP Kabupaten BS, Zulia Hastuti, SE, mengatakan nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor sejak tahun 1991 di

hap sudah diangsur. "Ada sekitar 20 ribuan unit kendaraan di Kabupaten B yang menunggak pajak kata Zulia.

Dengan angka tunggakan pajak kendaraan yang tergolong tinggi, Zulia berharap pemdes bisa diajak bekerja sama dengan pihaknya menagih pajak kendaraan jadi bisa menuransi anak